

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

📍 Jalan Veteran 30, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813

🌐 Posel : bkppd@gunungkidulkab.go.id, Laman : <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

☎ 0274 - 391393

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui pencapaian hasil yang optimal, serta cara pencapaiannya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya organisasi. Pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Renstra dan Renja.

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021 - 2026, serta sebagai wujud komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

Dari laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh para pihak yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Wonosari, Februari 2026

Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah,



[Signature]
ISKANDAR, SIP., MPA
NIP. 197303061992031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional”

Tujuan “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional” diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN, yang juga digunakan sebagai indikator pada sasaran strategis “Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat”.

Target Indeks Profesionalitas ASN 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025 realisasi Indeks Profesionalitas ASN mencapai 98,35, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 98,35 persen dan berada pada kategori sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target maksimal.

2. Capaian sasaran strategis “Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat”.

Sasaran strategis “Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat” yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 sebagai indikator kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 mencapai 98,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan manajemen ASN telah berjalan efektif dalam meningkatkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin aparatur sebagai pondasi pencapaian target tujuan pada tahun 2026.

3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” yang diukur melalui Nilai AKIP BKPPD juga menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dengan target sebesar 82,84, realisasi Nilai AKIP BKPPD mencapai 82,97, atau 100,1 persen dari target. Capaian ini

menegaskan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan BKPPD telah berjalan secara efektif dan akuntabel.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul kedepan, sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai karena alokasi pengadaan ASN sangat kurang.
2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai jabatannya.
3. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis IT.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen ASN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR.....	2
DAFTAR LAMPIRAN TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Cascading Kinerja.....	6
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	8
D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	10
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	11
F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	37
C. Efisiensi Anggaran.....	40
D. Inovasi.....	42
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	44

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	7
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BKPPD Kabupaten Gunungkidul.....	8
Gambar II.1. Sistem Informasi ASN Kabupaten Gunungkidul	24
Gambar II.2. Aplikasi Esakip.....	24
Gambar II.3. Aplikasi Ekinerja.....	25
Gambar II.4. Aplikasi SiPANDA.....	25
Gambar III.1 LHKPN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	12
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	13
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	14
Tabel II.1	Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	17
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	18
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	19
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Badan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	21
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	22
Tabel II.6	Program dan Anggaran Tahun 2025.....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	28
Tabel III.4	Capaian Sasaran Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.....	28
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	29
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	30
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.....	31
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	33
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	34
Tabel III.10	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	34

Tabel III.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026.....	35
Tabel III.12	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	35
Tabel III.13	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	36
Tabel III.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	41
Tabel III.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	41

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang*
- B. Cascading Kinerja*
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)*
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

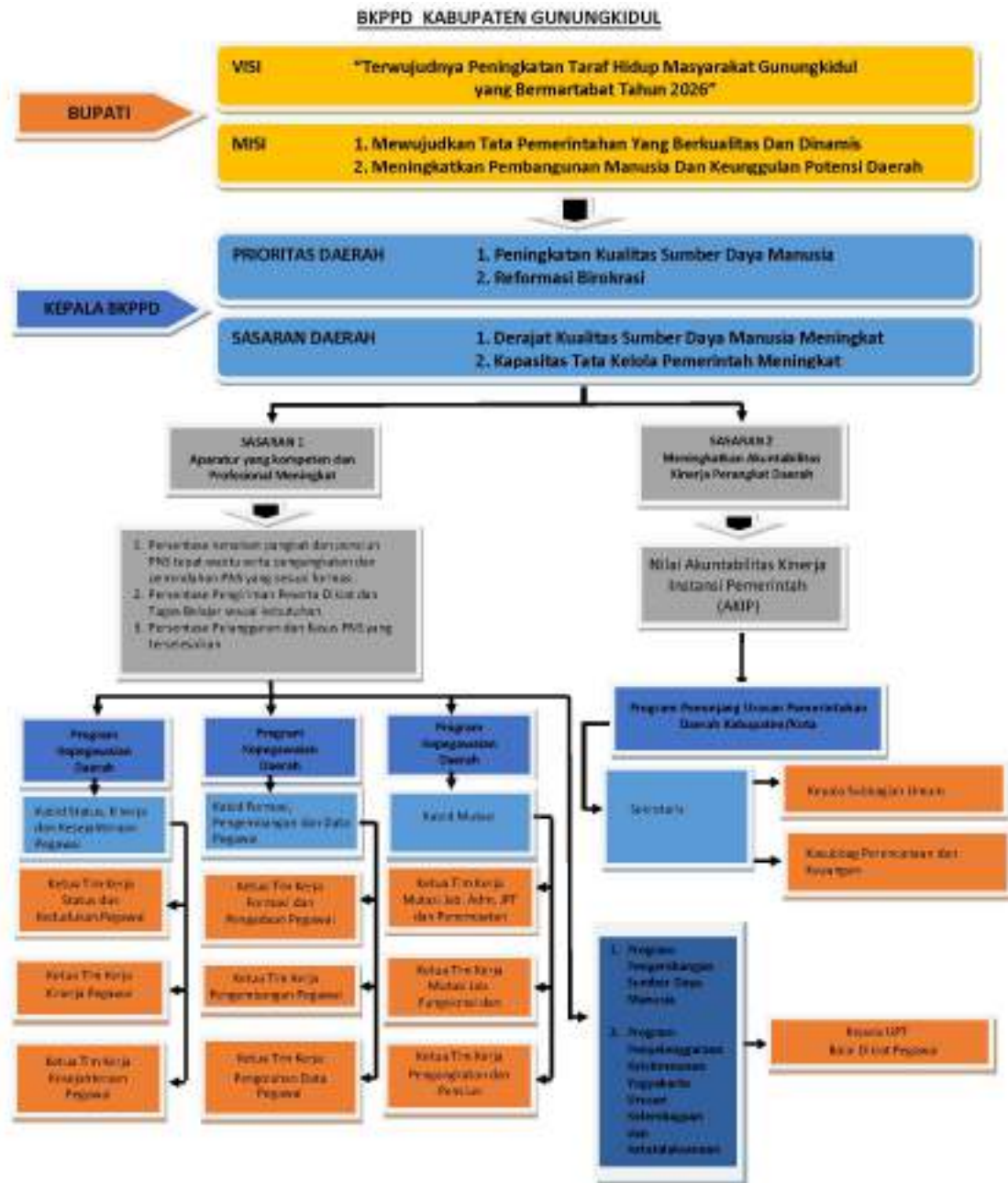
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2025, maka LKjIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah kepada Bupati Gunungkidul.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

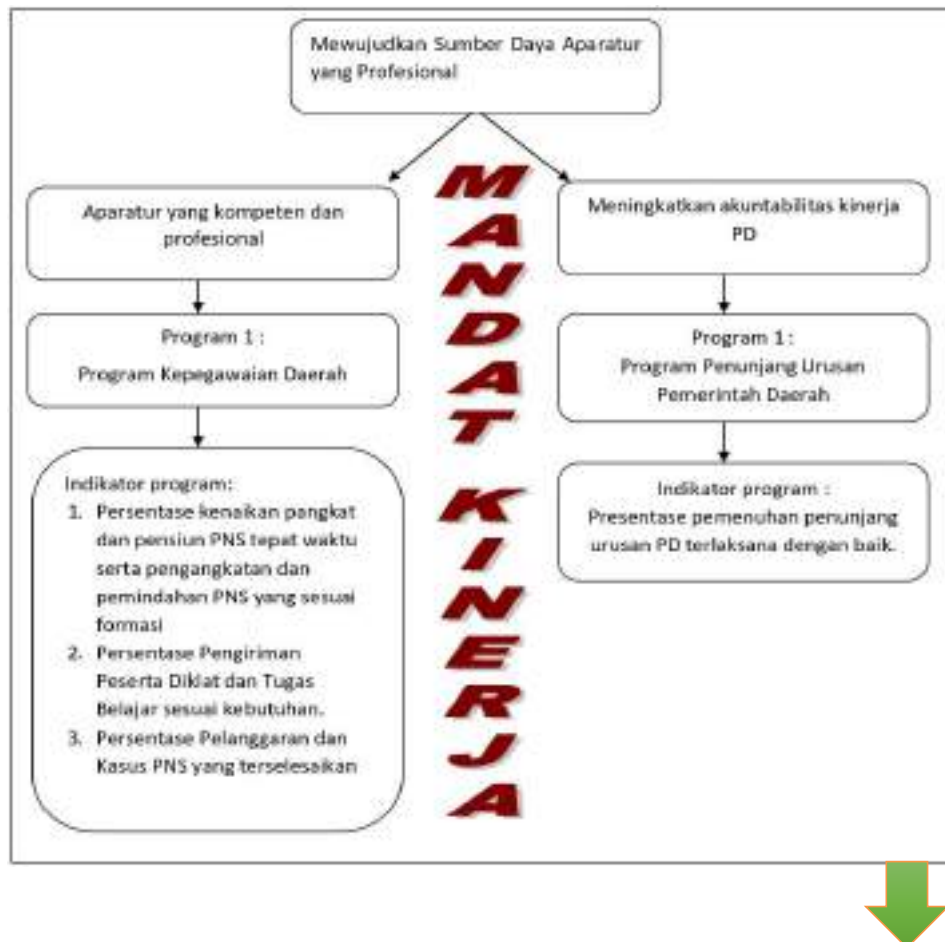
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

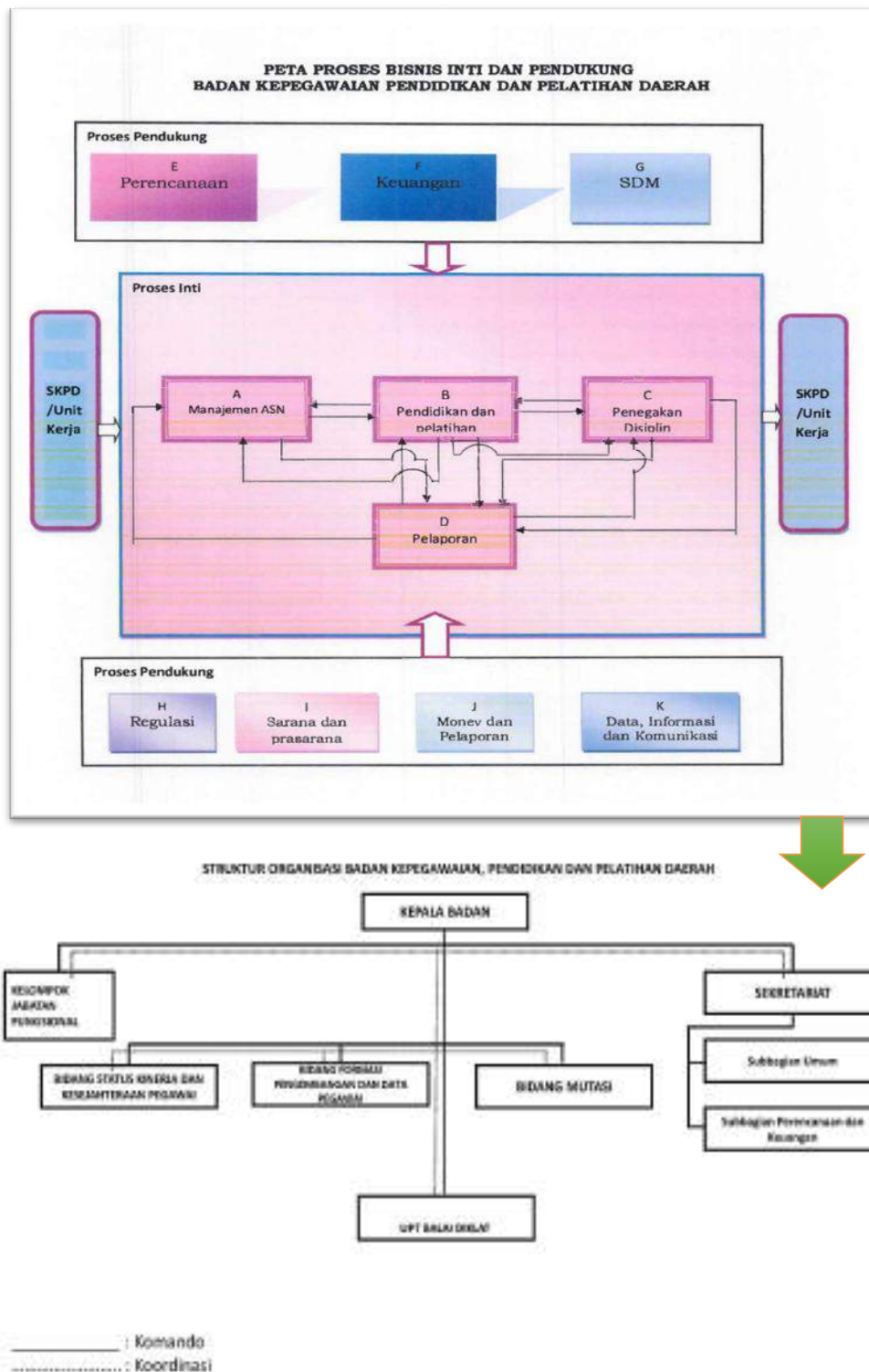


Gambar I.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BKPPD Kabupaten Gunugkidul

D. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

1. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut BKPPD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- d. pembinaan status, kedudukan pegawai, dan peningkatan kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN dan fasilitasi pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai ASN;
- g. pengolahan data dan sistem informasi ASN;
- h. penyelenggaraan pengembangan pegawai ASN;
- i. penyiapan bahan pengangkatan, mutasi jabatan administrasi, JPT dan fungsional, penempatan, kepangkatan, dan pensiun ASN Daerah;

- j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
- n. pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai;
- e. Bidang Mutasi;
- f. UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi BKPPD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya penerapan Merit Sistem, yaitu manajemen kepegawaian yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- 2. Rekrutmen ASN yang profesional dan berintegritas serta penempatan ASN sesuai kompetensi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

3. Belum terdapat pola karir yang jelas bagi ASN untuk dapat mengembangkan diri sesuai kebutuhan, dan meningkatkan motivasi.
4. Kebutuhan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah belum dapat dipenuhi secara optimal dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil maupun PPPK karena jumlah ASN yang pensiun setiap tahun lebih besar dari jumlah formasi yang ditetapkan.
5. Teknologi Informasi dan ketersediaan server yang dimiliki belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk menunjang manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi dari pemerintah pusat.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						L	P
1	2	3	4					5	6						7	8
			S 2	S1	D3	SL TA	SL TP		S 3	S 2	S1	D IV	D III	SL TA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1				1	0	1	0	0	0	0	1	0
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	4		4				4	0	1	2	1	0	0	3	1
	2. Pengawas	4			4			4	1	0	1	2	0	0	3	1
	3. Pelaksana	57		22	13	20	2	31	0	0	13	0	4	14	16	15
C.	Jabatan Fungsional	40		23	17	0	0	10	0	2	5	1	1	1	7	3
	Jumlah	106		50	34	20	2	50	1	4	21	4	5	15	30	20

Sumber: Data Kepegawaian BKPPD Per Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BKPPD Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, ASN laki-laki sebanyak 30 orang atau 60% dan ASN perempuan sebanyak 20 orang atau 40%. Didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (42%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 15 orang (30%), D3 ada 5 orang (10%), S2 sebanyak 4

orang (8%), DIV sebanyak 4 orang (8%) dan S3 ada 1 orang (2%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki namun untuk jabatan struktural ada yang dijabat oleh 2 perempuan bahkan salah satunya pada level administrator. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 56 orang, yang terdiri dari 30 orang pejabat pelaksana dan 32 pejabat fungsional tertentu. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan seleksi pengadaan ASN dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah akan mendapat penambahan ASN sebanyak 5 orang.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi Barang				Nilai Barang
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TANAH	4					25.126.560,00
1	Tanah	4	Baik	-	-	-	25.126.560,00
B	PERALATAN & MESIN	1.095					3.535.802.580,12
1	Alat-alat Angkutan	23	Baik	-	-	-	958.319.203,12
2	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Baik	-	-	-	15.085.000,00
3	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	872	Baik	-	-	-	1.118.319.811,00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	39	Baik	-	-	-	274.652.160,00
5	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	4	Baik	-	-	-	2.000.000,00
	Alat Laboratorium	8	Baik	-	-	-	3.818.000,00
6	Komputer	133	Baik	-	-	-	1.151.134.406,00
7	Peralatan Olahraga	15	Baik	-	-	-	12.474.000,00
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	7					9.748.088.459,65
1	Bangunan Gedung	5	Baik	-	-	-	9.296.183.689,88
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Baik	-	-	-	451.904.769,77
D	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	6					12.215.000,00

1	Instalasi	1	Baik	-	-	-	400.000,00
2	Jaringan	5	Baik	-	-	-	11.815.000,00
E	ASET TETAP LAINNYA	232					19.691.800,00
1	Bahan Perpustakaan	232	Baik	-	-	-	19.691.800,00
F	ASET LAINNYA	91	Baik	-	-	-	721.548.922,00
1	Aset Tidak Berwujud	10	Baik	-	-	-	498.637.000,00
2	Aset Lain-lain	81	-	-	-	Rusa k Berat	222.911.922,00
	JUMLAH	1.435					14.062.473.321,77

Sumber: Laporan Aset Tetap 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni satu (1) unit kendaraan dinas jabatan untuk Kepala Badan, empat (4) unit kendaraan operasional, dan dua puluh tiga (18) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode	Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0	Rp0	Rp0
4	1 2	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	Rp0
		Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	Rp0
5		BELANJA DAERAH	Rp125.777.443.799	Rp123.219.594.144	(Rp2.557.849.655)
5	1	BELANJA OPERASI	Rp125.547.341.799	Rp122.989.492.144	Rp2.557.849.655
5	1 1	Belanja Pegawai	Rp119.182.098.399	Rp120.184.043.244	Rp1.001.944.845
5	1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.365.243.400	Rp2.805.448.900	(Rp3.559.794.500)

5	1	5	Belanja Hibah	Rp0	Rp0	Rp0
5	2		BELANJA MODAL	Rp230.102.000	Rp230.102.000	Rp0
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp230.102.000	Rp230.102.000	Rp0
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	Rp0
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Belanja	Rp125.777.443.799	Rp123.219.594.144	(Rp2.557.849.655)
			Total Surplus/(Defisit)	Rp125.777.443.799	Rp123.219.594.144	(Rp2.557.849.655)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran BKPPD Kabupaten Gunungkidul semula Rp125.777.433.799 dan mengalami perubahan menjadi Rp123.219.594.144 atau berkurang Rp2.557.849.655. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan tindak lanjut adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait rasionalisasi anggaran. Hal tersebut cerminan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui BKPPD Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk realokasi anggaran guna program dan kegiatan berjalan lancar.

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Penguatan tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan pada level Pemerintah Daerah secara langsung bergantung pada keberhasilan BKPPD dalam mengelola pengembangan kompetensi, kinerja, dan akuntabilitas aparatur. Keterkaitan ini menegaskan bahwa tujuan dan sasaran BKPPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

**Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai		81,25	81,35	81,45	81,65	81,75	81,75
3.	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Indeks profesionalitas ASN	Persen	100	100	100	100	100	100	100

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terukur, serta berkelanjutan. Strategi organisasi disusun sebagai pedoman dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar mampu menjawab tantangan lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Aparatur yang kompeten profesional dan meningkat	1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pemberian ijin belajar dan tugas belajar. 2. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat. 3. Mengembangkan pola kemitraan untuk penyelenggaraan diklat aparatur. 4. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai. 5. Penataan ASN yang sesuai kebutuhan. 6. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional 7. Pembinaan ASN. 8. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.	1. Pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar aparatur. 2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur. 3. Membangun jejaring dalam penyelenggaraan diklat. 4. Meningkatkan kualitas pengadaan pegawai. 5. Distribusi ASN sesuai formasi dan kompetensi. 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. 7. Melaksanakan pembinaan disiplin ASN. 8. Membangun Sistem informasi yang terintegrasi yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Program Kepegawaian Daerah	120.998.296.605,00	118.539.659.496,00	(2.458.637.109,00)
	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	544.276.000,00	307.901.000,00	236.375.000,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	515.650.000,00	253.850.000,00	281.800.000,00
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4.950.000,00	14.550.000,00	9.600.000,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.676.000,00	39.501.000,00	(15.825.000,00)
	Mutasi dan Promosi ASN	349.180.000,00	330.120.000,00	19.060.000,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	3.985.000,00	3.045.000,00	-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	47.330.000,00	32.410.000,00	(14.920.000,00)

	Pengelolaan Promosi ASN	297.865.000,00	294.665.000,00	(3.200.00,00)
	Pengembangan Kompetensi ASN	921.030.000,00	917.030.000,00	(4.000.000,00)
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	910.250.000,00	916.520.000,00	6.270.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.780.000,00	510.000,00	(10.270.000,00)
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	119.183.810.605,00	116.984.608.496,00	(2.199.202.109,00)
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.500.000,00	14.500.000,00	(1.000.000,00)
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	119.085.060.605,00	116.819.058.496,00	(2.266.002.109,00)
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	16.000.000,00	19.400.000,00	3.400.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	9.150.000,00	6.950.000,00	(2.200.000,00)
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	52.100.000,00	115.700.000,00	63.600.000,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	266.999.800,00	228.084.800,00	(38.915.000,00)
	Pengembangan Kompetensi Teknis	266.999.800,00	228.084.800,00	(38.915.000,00)
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	266.999.800,00	228.084.800,00	(38.915.000,00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		121.265.296.405,00	118.767.744.296,00	(2.497.552.109,00)

Sumber: Perubahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BKPPD Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.825.000,00	5.822.000,00	(3.000,00)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	650.000,00	647.000,00	(3.000,00)
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000,00	650.000,00	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.575.000,00	1.575.000,00	-
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000,00	550.000,00	-

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.380.423.794,00	3.376.674.248,00	(3.749.546,00)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.376.327.794,00	3.372.924.748,00	(3.403.046,00)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	282.500,00	(317.500,00)
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.496.000,00	3.467.000,00	(29.000,00)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.947.600,00	82.691.600,00	(22.256.000,00)
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.967.600,00	20.567.600,00	(12.400.000,00)
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.980.000,00	48.374.000,00	(8.606.000,00)
1.3.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	13.750.000,00	(1.250.000,00)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.330.400,00	154.531.400,00	(33.799.000,00)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.996.000,00	88.336.600,00	(660.000,00)
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.858.400,00	6.858.400,00	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	1.750.000,00	-
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	-
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	-
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.066.000,00	25.927.000,00	(33.139.000,00)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.350.000,00	194.350.000,00	-
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.350.000,00	78.350.000,00	-
1.5.2	Pengadaan Mebel	116.000.000,00	116.000.000,00	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.042.800,00	215.242.800,00	200.000,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.735.000,00	28.935.000,00	200.000,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.679.800,00	95.679.800,00	-
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.628.000,00	90.628.000,00	-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.542.800,00	272.942.800,00	400.000,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.700.000,00	86.700.000,00	-
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.204.400,00	158.604.000,00	400.000,00
1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.138.400,00	11.138.400,00	-
1.7.6	Total Anggaran Pendukung	4.361.462.394,00	4.302.254.848,00	(59.207.546,00)

Sumber: Perubahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BKPPD Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN 2026	Indeks	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Aparatur yang kompeten dan professional meningkat	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	82,84

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp4.361.462.394	APBD
Program	Rp120.998.296.605	APBD

Kepegawaian Daerah		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp266.999.800	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	Rp150.685.000	APBD

Pada tahun 2025, Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya realokasi anggaran, dilantiknya Kepala Daerah baru serta telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN 2026	Indeks	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Aparatur yang kompeten dan professional meningkat	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	82,84

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat perubahan dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Program dan Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp4.302.254.848	APBD
Program Kepegawaian Daerah	Rp118.539.659.496	APBD
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp228.084.800	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	Rp149.595.000	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi besaran anggaran berkurang sebesar 2,08% sehubungan adanya rasionalisasi anggaran kegiatan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja merupakan perangkat strategis yang digunakan organisasi untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Instrumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mengintegrasikan tujuan strategis organisasi dengan program, kegiatan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut beberapa instrumen pendukung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul;

1. Aplikasi *SIASN* atau Sistem Informasi ASN Kabupaten Gunungkidul. Aplikasi *SIASN* Kabupaten Gunungkidul sudah terintegrasi dengan

3. Aplikasi Ekinerja yang mana sekarang masuk di platform ASN Digital BKN, merupakan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang digunakan untuk menilai kinerja setiap ASN melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: ekinerja.bkn.go.id

Gambar II.3. Aplikasi Ekinerja

4. Aplikasi SiPANDA atau Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan, dan Inovasi Daerah, merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja dan inovasi daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam proses pengendalian, pelaporan, dan pengelolaan inovasi program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Sipanda.gunungkidulkab.go.id

Gambar II.4. Aplikasi SiPANDA

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN Tahun 2026	persen	100	99,87	100	98,35	98,35	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN Tahun 2026	persen	100	99,87	100	98,35	98,35	Sangat Baik	100
1.1	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	persen	100	99,87	100	98,35	98,35	Sangat Baik	100
1.2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	skor	82,80	82,84	82,84	82,97	100,1	A	81,75

Adapun analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional”

Tujuan BKPPD diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Target Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun pelaporan, realisasi Indeks Profesionalitas ASN mencapai 98,35. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan berada pada tingkat 98,35 persen terhadap target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target maksimal.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN. pada tujuan “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional” merupakan indikator yang sama dengan indikator pada sasaran strategis “Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat”. Oleh karena itu, capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran dianalisis secara terpadu.

1. Sasaran 1: Aparatur yang kompeten dan professional meningkat

Sasaran aparatur yang kompeten dan professional meningkat merupakan tujuan yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kinerja sasaran aparatur yang kompeten dan professional meningkat diukur dengan indikator Indeks professionalitas ASN. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	Capaian indikator dihitung dari Rata-rata capaian dari 1. Presentase kenaikan pangkat dan pensiun ASN tepat waktu serta penempatan yang sesuai kompetensi = 100 2. Presentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan = 92,58 3. Presentase kasus ASN yang terselesaikan = 100 Jadi, $((100+95,05+100):3)= 98,35$

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.	Indeks professionalitas ASN	100	98,35	98,35	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,35%, termasuk dalam kategori sangat tinggi meskipun realisasi tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 100.

Realisasi kinerja sebesar 98,35% pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan dari target 158 orang ASN hanya tercapai 132 orang yang mengajukan ijin belajar. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	100	99,87	98,35	100	98,35

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja ada penurunan. Penurunan capaian kinerja organisasi pada periode pelaporan ini disebabkan oleh belum tercapainya beberapa sub kegiatan yang telah direncanakan. Sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga berpengaruh terhadap realisasi indikator kinerja program dan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pencapaian target sasaran aparatur yang kompeten dan professional meningkat didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Presentase kenaikan pangkat dan pensiun ASN tepat waktu serta penempatan yang sesuai kompetensi, Presentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan dan Presentase kasus ASN yang terselesaikan.

Hubungan antara sasaran, indikator, dan meta indikator bersifat hierarkis dan saling terkait. Sasaran menjadi arah capaian yang ingin diwujudkan, indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian sasaran, dan meta indikator menetapkan target capaian indikator. Keterkaitan ini memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.	Program Kepegawaian Daerah	Presentase kenaikan pangkat dan pension ASN tepat waktu serta penempatan yang sesuai kompetensi	Rata-rata dari; 1. Jumlah dokumen Kenaikan pangkat terealisasi dibagi target dokumen dikali 100 2. Jumlah dokumen pengelolaan mutasi dibagi target dokumen dikali 100 3. Jumlah dokumen perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN/pension terealisasi dibagi target dokumen dikali 100
			Presentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan	Rata-rata dari : 1.Jumlah dokumen Pengelolaan adm. Diklat terealisasi dibagi target dokumen dikali 100 2.Jumlah orang yang dikirim diklat dibagi target dikali 100 3. jumlah realisasi orang yang tugas belajar dibagi target dikali 100
			Presentase kasus ASN yang terselesaikan	Jumlah dokumen terealisasi dibagi target dokumen dikali 100

Capaian kinerja program yang tersaji dalam tabel memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian program serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Capaian kinerja program pada sasaran BKPPD tersaji dalam tabel III.7 sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Aparatur yang kompeten dan professional meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Targ et (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Aparatur yang kompeten dan professional meningkat.	Indeks profession alitas ASN	98,35	Program Kepegawaian Daerah	Presentase kenaikan pangkat dan pension ASN tepat waktu serta penempata n yang sesuai kompetensi	100	100	Sangat Tinggi
				Presentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan	100	95,05	Sangat Tinggi
				Presentase kasus ASN yang terselesaik an	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	98,35	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Aparatur yang kompeten dan professional meningkat, rata-rata 98,35%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Aparatur yang kompeten dan professional meningkat tersebut didukung oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh ASN berperan penting dalam memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kinerja tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM yang belum sesuai dengan jumlah formasi yang seharusnya.
2. Adanya faktor eksternal yang mempengaruhi capaian.
3. Sistem merit belum dilakukan secara maksimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi CASN sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan SDM.
2. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengembangan karir bagi ASN.
3. Mendorong sistem merit agar kedepan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Menggunakan aplikasi untuk mempermudah mencapai kinerja yang maksimal, seperti Mobsi, SiPANDA, Ekinerja dan SIPD.
2. Menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik kepada mitra atau stakeholder terkait.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan cerminan dari komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
2	3	4
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Meta Indikator: Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP BKPPD Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Dengan Interpretasi : Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Nilai AKIP BKPPD pada tahun 2024 berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/17 tanggal 26 Maret 2025 perihal LHE AKIP pada BKPPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. BKPPD mendapat nilai 82,97 masuk kategori A (Memuaskan).

Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82,84	82,97	100,1	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 82,84 terealisasi 82,97 sehingga capaian kinerja sebesar 100,1%. Dalam LHE AKIP BKPPD tersebut juga terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh BKPPD. Untuk perbaikan implementasi SAKIP, BKPPD telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BKPPD dalam menindaklanjuti catatan saran/ rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja; Dokumen Perjanjian Kinerja belum tertulis tanggal penetapan	Melakukan verifikasi berjenjang atas Dokumen Perencanaan Kinerja yang akan diformalkan untuk memastikan Perjanjian Kinerja telah mencantumkan tanggal penetapan.	Telah ditindaklanjuti mengganti dokumen yang diupload dengan dokumen yang sudah tercantum tanggal penetapan dan meningkatkan ketelitian dalam verifikasi berjenjang.
2	Pengukuran Kinerja; a. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi.	NIHIL	NIHIL
3	Pelaporan Kinerja; Tidak terdapat catatan hasil evaluasi.	NIHIL	NIHIL

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; Tidak terdapat catatan hasil evaluasi.	NIHIL	NIHIL
---	---	-------	-------

Capaian Nilai AKIP tahun 2025 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82,80	82,84	82,97	81,75	101,49

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 82,84 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

**Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	100,1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	82,84	82,97	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100,1% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Adanya perubahan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan faktor eksternal sehingga diperlukan pergeseran anggaran kas.
2. Terdapat perbedaan standar harga dan keterbatasan anggaran yang ada sehingga perlu melakukan penyesuaian ulang.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal/ pihak terkait untuk melakukan penjadwalan ulang kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik
2. Melakukan konsultasi dengan TAPD dan Bidang Anggaran untuk menyesuaikan standar harga tertentu demi terlaksananya kegiatan.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sinergi dari berbagai pihak demi terlaksananya program dan kegiatan.
2. Kebutuhan penganggaran yang tercukupi menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu kegiatan

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

a. Bangunan ramah disabilitas

Bangunan kantor telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:

- Pintu masuk yang mudah diakses.
- Ruang pelayanan satu pintu di lantai 1 dan mudah diakses.

- Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan Kelompok rentan.
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- c. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- d. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- e. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap empat jenis pelayanan, yaitu:

- a. Permohonan pensiun
- b. Penerbitan karis/karsu/karpeg
- c. Usulan pencantuman gelar
- d. Peremajaan data pegawai

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2025 mencapai 85,15 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 86,57, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Penurunan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa harus ada upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2026.

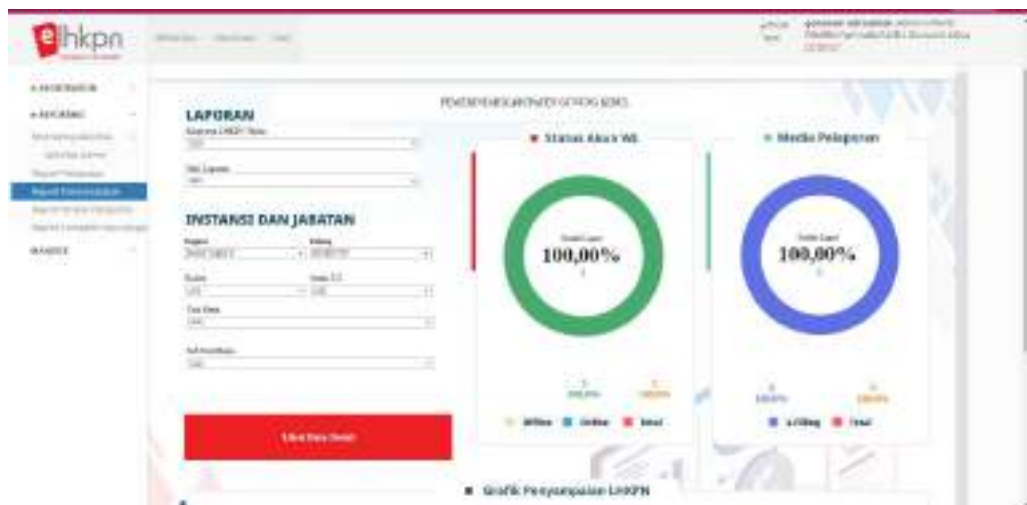
2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan di BKPPD. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* yang telah disusun pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2025, dengan indikator kinerja meningkatkan persentase ASN perempuan dalam mutasi maupun promosi pada jabatan struktural, baik pada jenjang Pengawas, Administrator, maupun pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sesuai data tercantum jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Desember 2024 adalah 6767 yang terdiri dari laki-laki 3127, dan perempuan 3640, atau 46,21% Laki-laki, dan 53,79% adalah Perempuan. Sedangkan jumlah pejabat Struktural adalah 530, terdiri dari 342 Laki-laki dan 188 Perempuan, atau 64,53 % Laki-laki dan 35,47% Perempuan. Dari hasil analisa tersebut ada kenaikan persentase perempuan yang menjabat struktural dari tahun sebelumnya. Dari 34,19% ASN perempuan yang menjabat struktural menjadi 35,47% sehingga target kinerja terpenuhi.

3. LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara. Dalam pelaporan dan ketepatan penyampaian LHKPN wajib lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 berhasil mencapai target 100%.



Sumber: elhkpn.kpk.go.id

Gambar III.1 LHKPN

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan dokumen laporan keuangan tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsi mendapat anggaran sebesar Rp123.219.594.144 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp121.712.288.894 (98,78%) sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp1.507.305.250 atau 1,22%. Dengan capaian kinerja 101,49% dan realisasi anggaran 98,78% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 102,23% sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel III.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai AKIP PD	82,84	82,97	100,1	123.219.594.144	121.712.288.894	98,78	101,23

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel III.16 berikut:

Tabel III.15 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	149.595.000	149.453.720	99,91	141.280	0,09%
1)	Peningkatan Budaya Pemerintahan	149.595.000	149.435.720	99,91	141.280	0,91%
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLAKSANA DENGAN BAIK	4.320.254.848	4.070.568.035	94,61	231.686.813	5,39%
1)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.822.000	5.822.000	100	0	0%
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.376.674.248	3.237.917.970	95,89	138.756.278	4,11%
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.691.600	78.750.950	95,23	3.940.650	4,77%
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.531.400	135.210.388	87,50	19.321.012	12,5%
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.350.000	167.964.567	86,42	26.385.433	13,58%
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.242.800	197.716.660	92,32	16.526.140	7,68%
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.942.800	246.185.500	90,20	26.757.300	9,8%
3.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	118.539.659.496	117.264.847.041	98,92	1274.812.445	1,08%
1)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	307.901.000	277.263.257	90,05	30.637.743	9,95%

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi Anggaran
2)	Mutasi dan Promosi ASN	330.120.000	216.821.850	79,31	68.298.150	20,69%
3)	Pengembangan Kompetensi ASN	917.030.000	906.460.000	98,85	10.570.000	1,15%
4)	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	116.984.608.496	115.819.301.934	99	1.165.306.562	1%
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	228.084.800	227.420.098	99,71	664.702	0,29%
1)	Pengembangan Kompetensi Teknis	228.084.800	227.420.098	99,71	664.702	0,29%
Jumlah Keseluruhan		123.219.594.144	121.712.288.894	98,78	1.507.305.250	

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BKPPD Daerah Kabupaten Gunungkidul, misalnya aplikasi Mobpsi (*Mobile Presensi*) untuk presensi ASN di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. APIK sebuah Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Gunungkidul yang didalamnya bisa untuk mengisi buku kerja/kinerja harian dan informasi data ASN. Ekinerja sebuah aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP. APIK SIKAPE sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3. Pengembangan Aplikasi APIK V3 menjadi APIK Linuwih, sebuah sistem berbasis aplikasi yang mengintegrasikan data dan layanan kepegawaian. Dengan pengembangan aplikasi ini, seluruh proses layanan kepegawaian, mulai dari pengusulan hingga pelacakan layanan, akan terintegrasi dalam satu sistem. Aplikasi APIK Linuwih juga menggabungkan Apik versi 3, Dashboard ASN, dan SiKape, serta terhubung dengan aplikasi internal (Mobsi, Buku Kerja) dan eksternal (SIASN BKN dan E-Kinerja BKN). Sehingga diharapkan kedepan ASN tidak perlu banyak lagi mengakses berbagai jenis aplikasi. Selain itu Aplikasi APIK Linuwih ini sudah menggunakan sistem keamanan dua arah dengan menggunakan *authenticator* sehingga memiliki system keamanan yang lebih dibanding dengan aplikasi sebelumnya dan APIK Linuwih akan menjadi rumah besarnya aplikasi layanan kepegawaian.
4. Inovasi Aplikasi Piwulang Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Piwulang, yang bermakna pembelajaran, hadir sebagai platform digital pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengembangan kompetensi ASN secara lebih mudah, terstruktur, dan inklusif. Aplikasi piwulang sudah digunakan untuk fasilitasi MOOC PPPK, sehingga dengan aplikasi ini dapat menghemat anggaran secara signifikan dibandingkan dengan metode pengiriman peserta MOOC PPPK.

BAB IV berisi:

- A. *Kesimpulan*
- B. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja BKPPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun capaian kinerja telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS maupun PPPK, pengembangan kompetensi ASN, dan Penyelesaian administrasi kepegawaian.

Kedua Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Implementasi langkah perbaikan kinerja dilakukan secara konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pimpinan berperan sebagai penggerak dan teladan dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan. Melalui langkah perbaikan kinerja yang berkesinambungan, diharapkan tercipta peningkatan produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan serta kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN

- 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya***
- 2.Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024***
- 3.Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi AKIP Th 2024***



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦒꦺꦴꦏꦤ꧀ꦥꦤꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦺꦭꦠꦶꦗꦤꦤꦺꦴꦢꦤ꧀ꦢꦏꦁ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Pihak Kesatu

ISKANDAR, S.IP., MPA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026	Persen	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	82,84

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 120.998.296.605,00	APBD
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 266.999.800,00	APBD
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 150.685.000,00	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.361.462.394,00	APBD

Pinak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pinak Kesatu

ISKANDAR, S.IP., MPA.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Iskandar, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Freebie

Pihak Ketiga

Pihak Ketiga



RENI LINAWATI, S. Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

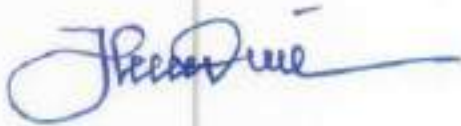
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	82,84
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Persen	100
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	Persen	100
1.3	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100
1.4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Terlayani	Persen	100
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Baik	Persen	100
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan Baik	Persen	100
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.361.462.394,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.825.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.380.423.794,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian	Rp. 104.947.600,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 188.330.400,00	APBD

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	194.350.000,00	APBD
1.6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	215.042.800,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	272.542.800,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu



RENI LINAWATI, S. Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60
2	Tersedianya Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen dan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60
4	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Paket Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
6	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
9	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6

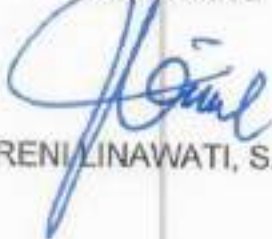
11	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
12	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7
16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	45
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16
18	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
19	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10
20	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 15.000.000,00	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 32.967.600,00	APBD
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 56.980.000,00	APBD

4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	6.600.000,00	APBD
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	88.996.000,00	APBD
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.160.800,00	APBD
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	10.850.000,00	APBD
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rp.	1.080.000,00	APBD
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	10.500.000,00	APBD
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	59.066.000,00	APBD
11	Pengadaan Mebel	Rp.	54.000.000,00	APBD
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	78.350.000,00	APBD
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	28.735.000,00	APBD
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp.	56.590.000,00	APBD
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp.	90.628.000,00	APBD
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	84.900.000,00	APBD
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	7.400.000,00	APBD
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	158.204.400,00	APBD
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	3.000.000,00	APBD
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	11.138.400,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



RENI LINAWATI, S. Sos

Pihak Kesatu



BUDI ASRORI, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Adi Susman, S.STP
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Reni Linawati, S. Sos
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

RENI LINAWATI, S. Sos

Pihak Kesatu

GUNAWAN ADI SUSMAN, S.STP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
7.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
8.	Terlaksananya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	660
9.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1

10.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Triwulanan/ SKPD dan Koordinasi Laporan Bulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13
-----	---	--	---	---------	----

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.400.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 500.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 500.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 650.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 650.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.575.000,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 550.000,00	APBD
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.376.327.794,00	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 600.000,00	APBD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 3.496.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



RENI LINAWATI, S. Sos

Pihak Kesatu



GUNAWAN ADI SUSMAN, S.STP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦼꦥꦒꦮꦮꦶꦤ꧀ꦥꦺꦤꦢꦶꦏꦶꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦭꦠꦶꦗꦤ꧀ꦢꦂꦒꦫꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Farid Juni Haryanto, SE.
Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Iskandar, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu

M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG FORMASI, PENGEMBANGAN, DAN DATA PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang Up to Date	Persentase Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang Up to Date	Persen	100
2	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 539.326.000,00	APBD
2	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 921.030.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu



M. FARID JUNI HARYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦸꦭꦏꦁꦥꦺꦤꦝꦶꦢꦏꦁꦥꦺꦭꦠꦶꦗꦏꦁꦏꦺꦴꦏꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dini Susilowati, S. Psi.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. Farid Juni Haryanto, SE.
Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Pihak Kesatu

INDAH DINI SUSILOWATI, S. Psi.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp. 515.650.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Pihak Kesatu



INDAH DINI SUSILOWATI, S. Psi.



ဘာသာရှိပါကရုံးအသေးကျပါစို့အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုဆိုသည်။

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryono, SH.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengembangan Pegawai Bidang Formasi,
Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. Farid Juni Haryanto, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

General

Pihak Kesatu

Pihak Kesa

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4
2	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	158

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Rp.	910.250.000,00	APBD
2	Pengelola Pendidikan Lanjutan ASN Rp.	10.780.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Pihak Kesatu



SURYONO, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦥꦒꦮꦫꦶꦤ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦺꦴꦩꦤꦶꦥꦺꦭꦠꦶꦗꦤꦢꦫꦺꦴꦩꦤꦶꦥ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofiantoro, A.Md

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengolahan Data Pegawai Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. Farid Juni Haryanto, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Pihak Kesatu

NOFIANTORO, A.Md.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	Hasil Data Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 23.676.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Pihak Kesatu



NOFIANTORO, A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tugiran, S.Pd.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Iskandar, S.IP., MPA.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Therese

Pihak Kesatu

TUGIRAN, S.Pd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persentase Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 4.950.000,00	APBD
2	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 349.180.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu



TUGIRAN, S.Pd.

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parman, S.Pd.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Mutasi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penempatan Pegawai Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Tugiran, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

TUGIRAN, S.Pd.

Pihak_Kesatu

PARMAN, S.Pd.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJA MUTASI JABATAN ADMINISTRASI, JPT, DAN PENEMPATAN
PEGAWAI BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 3.985.000,00	APBD
2	Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 297.865.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua


TUGIRAN, S.Pd.

Pihak Kesatu


PARMAN, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Purwantara, S.IP
Jabatan : Ketua Tim Kerja Mutasi Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nama : Tugiran, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

TUGIRAN, S.Pd

Pihak Kesatu

HENRY PURWANTARA, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJA MUTASI JABATAN FUNGSIONAL DAN KEPANGKATAN BIDANG
MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengelolaan Pangkat ASN	Kenaikan Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	6

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan ASN	Kenaikan Pangkat Rp.	47.330.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



TUGIRAN, S.Pd.

Pihak Kesatu



HENRY PURWANTA, S. IP.

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harda Wahyudi
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengangkatan dan Pensiun Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Tugiran, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

TUGIRAN, S.Pd.

Pihak Kesatu


HARĐA WAHYUDI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGANGKATAN DAN PENSIUN BIDANG MUTASI BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	4

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perumusan Bahan Kebijakan Rp. Pemberhentian ASN	4.950.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua


TUGIRAN, S.Pd.

Pihak Kesatu


HARDA WAHYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunawan, S.H., M. H.
Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nama : Iskandar, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Jeffrey

Pihak Kesatu

SUNAWAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG STATUS, KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	Persentase Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 119.183.810.605,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu



SUNAWAN, S.H., M. H.



ຫາລຸກຊີວິດກຳລັງມີຊີວິດຊີວາງລາວຕິດກັບເກີດກຸ່ມ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustinus Subandi, S.Sos.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Status dan Kedudukan Pegawai Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Sunawan, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNAWAN, S.H., M.H.

Pihak Kesatu

YUSTINUS SUBANDI, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI BIDANG STATUS,
KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250
2	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 9.150.000,00	APBD
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp. 52.100.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua


SUNAWAN, S.H., M. H.

Pihak Kesatu


YUSTINUS SUBANDI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Irawati, A.Md.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kinerja Pegawai Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Sunawan, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNAWAN, S.H., M.H.

Pihak Kesatu

ERNI IRAWATI, A.Md

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KINERJA PEGAWAI BIDANG STATUS, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	8

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 15.500.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



SUNAWAN, S.H., M. H.

Pihak Kesatu



ERNI ERNAWATI, A.Md.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJA KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG STATUS, KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	4
2	Terlaksananya Pemberian Penghargaan ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	29.750
3	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 6.000.000,00	APBD
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp. 119.085.060.605,00	APBD
3	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Rp. 16.000.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNAWAN, S.H., M. H.

Pihak Kesatu

EKA WAHYANA, S. S. T



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Saryana, S.IP., M.Si.

Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Iskandar, S.IP., MPA.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Frederic

Pihak Kesatu

Dr. SARYANA, S.P., M.Si.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti oleh ASN Teraksana	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	126
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil yang Diselenggarakan	Laporan	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 266.999.800,00	APBD
2	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Rp. 150.685.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR, S.IP., MPA.

Pihak Kesatu



Dr. SARYANA, S.IP., M. Si.



Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilia Kartini Sugito, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Saryana, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Dr. SARYANA, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu

LILIA KARTINI SUGITO, A.Md

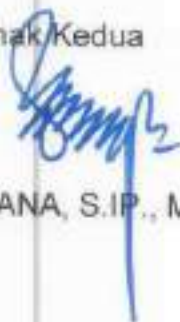
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	Paket	1
2	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
3	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
4	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
5	Tersedianya Paket Mebel	Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	6
8	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.400.000,00	APBD
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 697.600,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 900.000,00	APBD
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rp. 1.080.000,00	APBD
5	Pengadaan Mebel	Rp. 62.000.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 39.089.800,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.800.000,00	APBD
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.600.000,00	APBD
9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.500.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



Dr. SARYANA, S.IP., M. Si.

Pihak Kesatu



LILIA KARTINI SUGITO, A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN
PELATIHAN DAERAH**

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦒꦼꦒꦮꦫꦶꦤ꧀ꦥꦺꦤꦢꦶꦢꦶꦏꦺꦴꦩꦤꦼꦢꦶꦥꦺꦴꦭꦶꦥꦠꦶꦩꦤꦼꦢꦶꦥꦺꦴꦭꦶꦥꦠꦶꦩ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon / Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

ISKANDAR

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026	Persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	82,84

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 118.498.459.496,00	APBD-P
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 228.084.800,00	APBD-P
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 149.595.000,00	APBD-P
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.302.254.848,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

ISKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENI LINAWATI, S. Sos

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025



Pihak Kesatu

RENI LINAWATI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	82,84
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Persen	100
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	Persen	100
1.3	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100
1.4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Terlayani	Persen	100
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Baik	Persen	100
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan Baik	Persen	100
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.302.254.848,00	APBD-P
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.822.000,00	APBD-P
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.376.674.248,00	APBD-P
1.3	Administrasi Kepegawaian	Rp. 82.691.600,00	APBD-P

1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	154.531.400,00	APBD-P
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	194.350.000,00	APBD-P
1.6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	215.242.800,00	APBD-P
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	272.942.800,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR

Pihak Kesatu



RENI LINAWATI



បាវេន្តបិកាវ៉ាបាវេន្តបិកាវ៉ាបាវេន្តបិកាវ៉ាបាវេន្តបិកាវ៉ាបាវេន្តបិកាវ៉ា

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI ASRORI, S.IP
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RENI LINAWATI, S. Sos
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



RENI LINAWATI

Pihak Kesatu



BUDI ASRORI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	55
2	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49
4	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
5	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
6	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
8	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6

11	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
12	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7
16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	45
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16
18	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
19	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10
20	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 13.750.000,00	APBD-P
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 20.567.600,00	APBD-P
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 48.374.000,00	APBD-P

4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	6.600.000,00	APBD-P
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	88.336.000,00	APBD-P
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.160.800,00	APBD-P
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	10.850.000,00	APBD-P
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rp.	1.080.000,00	APBD-P
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	10.500.000,00	APBD-P
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	25.927.000,00	APBD-P
11	Pengadaan Mebel	Rp.	54.000.000,00	APBD-P
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	78.350.000,00	APBD-P
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	28.935.000,00	APBD-P
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp.	56.590.000,00	APBD-P
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp.	90.628.000,00	APBD-P
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	84.900.000,00	APBD-P
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	7.400.000,00	APBD-P
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	158.604.400,00	APBD-P
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	3.000.000,00	APBD-P
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	11.138.400,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


RENI LINAWATI

Pihak Kesatu


BUDI ASRORI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦧꦏꦼꦒꦒꦮꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦥꦺꦝꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦢꦏꦺꦑꦒꦶꦥꦺꦭꦠꦶꦗꦤꦢꦒꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNAWAN ADI SUSMAN, S.STP

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RENI LINAWATI, S. Sos

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

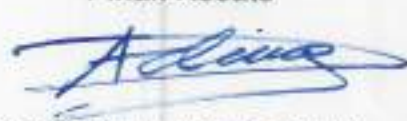
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


RENI LINAWATI

Pihak Kesatu


GUNAWAN ADI SUSMAN

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
7.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
8.	Terlaksananya Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	660
9.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1

10.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Laporan Bulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13
-----	---	--	--	---------	----

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.400.000,00	APBD-P
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 500.000,00	APBD-P
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 500.000,00	APBD-P
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 647.000,00	APBD-P
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 650.000,00	APBD-P
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.575.000,00	APBD-P
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 550.000,00	APBD-P
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.372.924.748,00	APBD-P
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 282.500,00	APBD-P
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 3.467.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


RENI LINAWATI

Pihak Kesatu


GUNAWAN ADI SUSMAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

ຫາລຸກຊີວິດກຳລາພາດຊີວິດຊື່ສາດສະໜາອາດອີກໜຶ່ງບາງຄູ່ ກຸ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

ISKANDAR

M. FARID JUNI HARYANTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG FORMASI, PENGEMBANGAN, DAN DATA PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang Up to Date	Persentase Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang Up to Date	Persen	100
2	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 293.351.000,00	APBD-P
2	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 917.030.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025


Pihak Kedua

ISKANDAR

Pihak Kesatu

M. FARID JUNI HARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH DINI SUSILOWATI, S. Psi.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

M. FARID JUNI HARYANTO

Pihak Kesatu

INDAH DINI SUSILOWATI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp. 253.850.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO

Pihak Kesatu



INDAH DINI SUSILOWATI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦏꦥꦢꦤꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦭꦠꦶꦁꦤꦺꦴꦢꦏꦤ꧀ꦢꦏꦏꦥꦢ

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,

Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOFIANTORO, A.Md

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengolahan Data Pegawai Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

M. FARID JUNI HARYANTO

Pihak Kesatu

NOFIANTORO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 39.501.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO

Pihak Kesatu



NOFIANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYONO, SH.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengembangan Pegawai Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : M. FARID JUNI HARYANTO, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

vanaf 20.

Prak Kesatu

Pinak Res.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	5
2	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	155

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Rp.	916.520.000,00	APBD-P
2	Pengelola Pendidikan Lanjutan ASN Rp.	510.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



M. FARID JUNI HARYANTO

Pihak Kesatu



SURYONO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persentase Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 14.550.000,00	APBD-P
2	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 330.120.000,00	APBD-P


Pihak Kedua

ISKANDAR

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu

TUGIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

[illegible]

Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARMAN, S.Pd.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Mutasi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penempatan Pegawai Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TUGIRAN, S.Pd.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

TUGIRAN

Pihak Kesatu

PARMAN

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJA MUTASI JABATAN ADMINISTRASI, JPT, DAN PENEMPATAN
PEGAWAI BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 3.045.000,00	APBD-P
2	Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 294.665.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


TUGIRAN

Pihak Kesatu


PARMAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY PURWANTARA, S.IP
Jabatan : Ketua Tim Kerja Mutasi Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TUGIRAN, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



TUGIRAN

Pihak Kesatu


HENRY PURWANTARA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJA MUTASI JABATAN FUNGSIONAL DAN KEPANGKATAN BIDANG
MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengelolaan Pangkat ASN Kenaikan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	6

No	Sub Kegiatan			Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengelolaan ASN	Kenaikan	Pangkat Rp.	32.410.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



TUGIRAN

Pihak Kesatu



HENRY PURWANTA



ຫາລຸ້ນປີກກຳປາມລອງປີກຊີເລີກລອງລາດ ວິກາເອີກລູດ ກຸ

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDA WAHYUDI
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengangkatan dan Pensiun Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TUGIRAN, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


TUGIRAN

Pihak Kesatu


HARDA WAHYUDI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGANGKATAN DAN PENSIUN BIDANG MUTASI BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	4

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Rp. 14.550.000,00	APBD-P

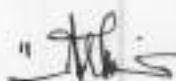
Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



TUGIRAN

Pihak Kesatu



HARDA WAHYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNAWAN, S.H., M. H.
Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


ISKANDAR



Pihak Kesatu



SUNAWAN

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG STATUS, KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	Persentase Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 116.943.408.496,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR

Pihak Kesatu



SUNAWAN



ຫາລຸ້ນມີກຳລັງມາດຕະຖານມີຄື ສາມາດຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງ ກຳລັງມາດຕະຖານ

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNI IRAWATI, A.Md.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Kinerja Pegawai Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNAWAN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

162

Pihak Kesatu

Handwritten signature

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KINERJA PEGAWAI BIDANG STATUS, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	6

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 14.500.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


SUNAWAN

Pihak Kesatu


ERNI IRAWATI



ຫາລຸກເບີກກໍ່ບາບທອງເບີກຊື່ສຳຄັນທອງເບີກ ມີກາເພີ່ມທອງເບີກ

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA WAHYANA, S. S. T

Jabatan : Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Pegawai Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNAWAN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

[Signature]

Pihak Kesatu

Yes

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG STATUS, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	4
2	Terlaksananya Pemberian Penghargaan ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	29.750
3	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 6.000.000,00	APBD-P
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp. 116.845.758.496,00	APBD-P
3	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Rp. 19.400.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


SUNAWAN

Pihak Kesatu


EKA WAHYANA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI BIDANG STATUS,
KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250
2	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 6.950.000,00	APBD-P
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp. 50.800.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua


SUNAWAN

Pihak Kesatu


YUSTINUS SUBANDI

[illegible]

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SARYANA, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

PIHAK KEDUA



ISKANDAR

Pihak Kesatu



SARYANA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti oleh ASN Terlaksana	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	126
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil yang Diselenggarakan	Laporan	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 228.084.800,00	APBD-P
2	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Rp. 149.595.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ISKANDAR

Pihak Kesatu

SARYANA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN DAERAH

ຫາລຸກຊີວິດກຳລາຍຂອງມີຄືເສດຖະກິດພາຍໃນເກີດຂຶ້ນ

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIA KARTINI SUGITO, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. SARYANA, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Phak Kedua

SARYANA

Pihak Kesatu

LILIA KARTINI SUGITO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
2	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
3	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
4	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
5	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	6
8	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
9	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.400.000,00	APBD-P
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 697.600,00	APBD-P
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 900.000,00	APBD-P
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.080.000,00	APBD-P
5	Pengadaan Mebel	Rp. 62.000.000,00	APBD-P
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 39.089.800,00	APBD-P
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.800.000,00	APBD-P
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.600.000,00	APBD-P
9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.500.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua



SARYANA

Pihak Kesatu



LILIA KARTINI SUGITO

[illegible]

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIKA AUDINA PUTERI, S.STP
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. SARYANA, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

SARYANA

Pihak Kesatu

VIKA AUDINA PUTERI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
2	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3
4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 900.000,00	APBD-P
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 270.000,00	APBD-P
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 12.615.365,00	APBD-P
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 975.000,00	APBD-P

Wonosari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua


SARYANA

Pihak Kesatu


VIKA AUDINA PUTERI



Jalan Veteran nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55813
Telepon /Faksimile: (0274)391393 Posel: bkppd@gunungkidulkab.go.id,
Laman: <http://bkppd.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAKHID SYARIFUDIN, S.E.T
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ISKANDAR, S.IP., MPA.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Preethi

Pihak Kesatu

WAKHID SYARIFUDIN

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persentase Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persen	100

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 11.951.200,00	APBD-P
2	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 290.554.150,00	APBD-P

Wonosari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua



ISKANDAR

Pihak Kesatu



WAKHID SYARIFUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦩꦼꦂꦶꦠ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7 / Ev-LKJ / 17
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas pembantuan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.8/SKIP/53 tanggal 15 Juli 2024, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menunjukkan bahwa nilai sebesar **82,97** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,19	25,12
2. Pengukuran Kinerja	30	23,91	24,55
3. Pelaporan Kinerja	15	12,90	12,20
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,84	82,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, namun tanggal penetapan tidak dicantumkan pada lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan verifikasi berjenjang atas Dokumen Perencanaan Kinerja yang akan diformalkan untuk memastikan Perjanjian Kinerja telah mencantumkan tanggal penetapan.

2. Pengukuran Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.


Inspektur,
Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.



စာအုပ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

Wonosari, 07 Mei 2025

Nomor : B/000.8.6.3/0667/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindaklanjut LHE AKIP
BKPPD Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2.7/EV-LKj/17 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

No	Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja; Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, namun tanggal penetapan tidak dicantumkan pada lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	Melakukan verifikasi berjenjang atas Dokumen Perencanaan Kinerja yang akan diformalkan untuk memastikan Perjanjian Kinerja telah mencantumkan tanggal penetapan	Akan ditindaklanjuti dengan verifikasi secara berjenjang dan memperbaiki lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 pada dokumen perencanaan kinerja
2	Pengukuran Kinerja; NIHIL	Tidak terdapat rekomendasi	-
3	Pelaporan Kinerja; NIHIL	Tidak terdapat rekomendasi	-

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; NIHIL	Tidak terdapat rekomendasi	-
---	---	-------------------------------	---

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

✦ Kepala,



✦ ISKANDAR, S. IP. M. PA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19730306 199203 1 001